

## Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Di Kalimantan Timur Masa Pandemi Covid-19)

### Penulis:

Yeni Santi<sup>1</sup>  
Agus Prasetyo<sup>2</sup>  
Ernayanti Nur Widhi<sup>3</sup>  
Hartanto<sup>4</sup>  
Rahmatiyah<sup>5</sup>

### Afiliasi:

Universitas  
Terbuka<sup>1,2,3,5</sup>  
UPN Veteran Jakarta<sup>4</sup>

### Korespondensi:

yenisanti.law@gmail.com,  
agusprasetyo9979@gmail.com,  
ernayantinurwidhi@gmail.com,

### Histori Naskah:

Submit: 10-09-2024  
Accepted: 01-10-2024  
Published: 30-11-2024

### Abstrak:

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah di kabupaten dan kota Provinsi Kalimantan Timur selama epedemi COVID-19 di pengaruhi oleh perimaan asli daerah (PAD), dana neraca fiskal (Dana Perimbangan) dan Belanja Daerah. Penelitian ini menekankan bagaimana belanja daerah berfungsi sebagai alar pengelolaan anggaran yang mempengaruhi stabilitas keuangan di saat krisis, kemandirian fiskal tercermin dalam PAD dan dana neraca fiskal merupakan sumber utama pendapatan daerah. Analisis regresi linier berganda adalah metode kuantitatif digunakan dalam penelitian ini. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan catatan keuangan dari Badan Pusat Statistik, Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Neraca Fiskal data sekunder digunakan. Delapan kota dan kabupaten dari 2020-2024 membentuk sampel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Dana Saldo Fiskal berdampak negative terhadap kinerja keuangan, PAD dan belanja daerah memiliki dampak positif. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ketergantungan pada Dana Neraca Fiskal menghambat indepedensi fiskal, area dengan PAD yang tinggi dan pengeluaran yang dikelola dengan baik biasanya memiliki kinerja keuangan yang lebih baik. Untuk meningkatkan kinerja kaungan yang berkelanjutan, terutama dalam mengatasi dampak ekonomi pandemi, temuan studi ini sangat menekankan pada optimalisasi PAD dan menilai penggunaan Dana Neraca Fiskal.

**Kata kunci:** Pendapatan Asli Daerah, Dana Neraca Fiskal, Belanja Modal, Kinerja Keuangan, Desentralisasi Fiskal

## Pendahuluan

Tujuan otonomi daerah, sebagaimana disyaratkan oleh. 33 Tahun 2004, adalah untuk memberikan pemerintah daerah lebih banyak kontrol atas bagaimana mereka mengelola sumber daya keuangan mereka. Kemandirian keuangan daerah, yang ditunjukkan dengan Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu penanda utama desentralisasi fiskal yang efektif. Sebagai sumber pendapatan utama daerah, PAD menunjukkan bahwa pemerintah daerah dapat mendanai pembangunan dan operasionalnya secara mandiri (Faisal et al., 2020). Kemampuan suatu wilayah untuk mengelalo kebijakan keuangan secara mandiri dan tanpa ketergantungan yang tidak semestinya pada pendanaan neraca fiskal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) meningkat dengan PAD-nya.

Meskipun demikian, banyak daerah di Indoensia masih sangat bergantung pada dana neraca fiskal. Dana ini dibagi antara Revenue Sharing Fund (DBH), Special Allocation Fubd(DAK) dan Geneeeral Allocation Fund ( DAU), berperan penting dalam membiayai belanja daerah, khususnya di daerah dengan PAD yang relkatif rendah. Wasil et al. (2020) menemukan bahwa meskipun PAD merupakan indikator kunci keberhasilan otonomi daerah, untuk mendanai inisiatif tata kelola mereka, banyak pemerintah daerah masih menggunakan dana perimbangan fiskal. Ketergantungan ini menunjukkan

bahwa kemandirian fiskal di berbagai daerah masih tidak optimal, sehingga berpotensi membatasi fleksibilitas daerah dalam merumuskan kebijakan keuangan indenden. Epedemi Covid-19 yang dimulainya pada awal 2020 telah membuat keuangan lokal secara signifikan. Penurunan aktivitas ekonomi telah menyebabkan penurunan penerimaan daerah, termasuk PAD sementara belanja daerah meningkatkan karena kebutuhan yang mendesak dan manajemen di sektor kesehatan dan program bantuan sosial. Studi oleh Marvianto (2021) mengungkapkan bahwa selama pandemi terjadi lonjakan belanja pemerintah daerah untuk kesehatan dan perlindungan sosial sehingga terjadi keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran. Kondisi ini menimbulkan tentang ketahanan fiskal pemerintah daerah dalam menghadapi tunjangan ekonomi yang disebabkan oleh kasus Global seperti covid-19. Hubungan antara PAD dana saldo fiskal pengeluaran daerah dan kinerja keuangan pemerintah daerah telah menjadi subjek dari banyak studi sebelumnya karena dengan tingkat ada yang lebih tinggi biasanya menunjukkan komoditas finansial yang lebih baik dan mengalokasikan sumber daya yang lebih efektif, Andriani & Wahid (2019) menemukan bahwa PAD memiliki dampak yang menguntungkan terhadap kinerja keuangan. Kontribusi dana perimbangan fiskal terhadap keuangan daerah diperiksa oleh Ginting et al. (2019) yang pada kesimpulannya menemukan bahwa pada PAD memiliki yang ketergantungan yang signifikan pada dana ini menunjukkan kurangnya otonomi fiskal. Kristina et. al.( 2021) menunjukkan bahwa belanja daerah memiliki korelasi positif dengan kinerja keuangan, terutama ketika dialokasikan secara efektif untuk sektor produktif seperti infratraktur dan kesehatan. Sementara itu, Aplriliani (2022) melihat bagaimana pendemi Covid-19 berdampak pada APBN Indonesia keuntungan dan menemukan bahwa sementara jumlahnya daerah meningkat terutama di bidang kesehatan dan bantuan sosial PAD. Menurut sejarah sertifikat sejarah signifikan dari berbagai penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pad dan anak aja gitu dan belanja daerah mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah namun studi yang secara khusus menganalisis dampak pandemi terhadap dinamika keuangan daerah di Kalimantan terbatas.

Fokusnya berbagai bagaimana epidemi Covid -19 telah mempengaruhi hubungan antara PAD dana neraca fiskal belanja daerah dan kinerja keuangan pemerintah daerah di Kalimantan Timur inilah yang membuat penelitian ini menjadi baru berbeda dengan penelitian sebelumnya atau berfokus pada satu variabel bukan penelitian ini mempertimbangkan kondisi krisis yang mempengaruhi keuangan daerah selama periode tertentu tahun tahun 2021, oleh karena itu penelitian ini diantisipasi akan menawarkan sudut pandang yang lebih terkini tentang stabilitas keuangan pemerintah daerah dalam bereaksi terhadap kunjungan ekonomi terkait ekonomi terkait pandemi

Berdasarkan latar belakang yang disebutkan di atas penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh PAD terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Kalimantan Timur selama pandemi Covid-19, mengkaji sejauh ini mana ketergantungan daerah terhadap dana neraca fiskal dalam membiayai pengeluaran daerah selama krisis dan menilai hubungan antara pengeluaran daerah dan kinerja keuangan pemerintah daerah dalam konteks pandemi. Selain itu, penelitian ini berupaya memberikan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan ketahanan fiskal di periode pasca pandemi melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh wawasan yang lebih dalam tentang strategi pengelolaan keuangan daerah selama krisis dan implikasinya terhadap kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia.

## **Studi Literatur**

### **Teori Pemangku Kepentingan**

Teori pemangku kepentingan, yang dikembangkan oleh freema at.all (2021), Menekankan bahwa organisasi termasuk pemerintah daerah harus mempertimbangkan kepentingan berbagai pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya. Dalam konteks keuangan daerah pemangku kepentingan termasuk publik pemerintah pusat investor dan entitas swasta yang terlibat dalam pembangunan daerah. Menurut teori ini pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk pengelolaan keuangan publik secara transparan dan akuntabilitas untuk memenuhi kepentingan publik dan meningkatkan kesejahteraan sosial.(Valentinov & Chia, 2022). Pemangku kepentingan pemerintah daerah Lebih cenderung mempercayai ketika berkinerja baik secara finansial. Teori pemangku kepentingan diterapkan dalam penelitian ini untuk memahami bagaimana kebijakan keuangan mempengaruhi berbagai pemangku kepentingan dan bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh pengelolaan PAD dana saldo fiskal dan pengeluaran daerah. desentralisasi fiskal adalah prinsip dasar dalam tata kelola daerah, memberikan otoritas kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya keuangan mereka. Oater (1972), dalam teori Federal fiskal, berpendapat bahwa desentralisasi fiskal memungkinkan pemerintah daerah untuk mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia, desentralisasi fiskal diatur dalam undang-undang Nomor 33 tahun neraca fiskal antara pemerintah pusat dan daerah, yang mengatur bahwa penerimaan daerah berasal dari PAD, dana neraca fiskal, dan sumber sah lainnya. Namun, penelitian menunjukkan bahwa Kebersihan desentralisasi fiskal bergantung pada kemandirian fiskal daerah yang tidak mengoptimalkan sumber pendapatan mereka sendiri. Pandu (2024). Penerimaan Asli Daerah dan kinerja keuangan pemerintah daerah tingkat kemandirian fiskal suatu daerah ditunjukkan oleh Pendapatan asli daerah. Menurut undang-undang Nomor 33 tahun itu terdiri dari pajak daerah, retribusi, pendapatan Dari aset daerah yang terpisah, dan sumber hukum lainnya. PHD yang lebih tinggi bukan kemandirian keuangan yang lebih besar, memungkinkan suatu wilayah untuk mendanai operasi dan pembangunannya tanpa bergantung pada pemerintah pusat (Heldi & Zela Zelika, 2020).

Penelitian sebelumnya telah menunjukkan korelasi positif antara PAD dan keberhasilan Keuangan pemerintah kota. Menurut Apriyandi (2019), daerah dengan PAD tinggi menunjukkan peningkatan efisiensi alokasi anggaran dan lebih banyak fleksibilitas fiskal. Padang (2023), lebih lanjut menekankan bahwa peningkatan pad berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan regional Stabilitas keuangan. namun, Putri dan Darmayanti (2019), menyoroti bahwa Ketergantungan pada bab juga dapat menyebabkan kesenjangan fiskal antara daerah yang secara ekonomi dan daerah dengan kapasitas ekonomi yang terbatas. Dana saldo fiskal dan ketergantungan daerah dana neraca fiskal mengacu pada transfer pemerintah pusat ke Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar daerah dan mendukung pembangunan daerah. Dana tersebut antara lain dana alokasi umum (DAU), Dana Alokas Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) (UUno.33 Tahun 2004).

Mayoritas daerah Indonesia masih sangat bergantung pada dana neraca fiskal, menurut Budianti & Alexander (2016), menunjukkan bahwa kemandirian keuangan daerah belum sepenuhnya ditingkatkan oleh desentralisasi fiskal. Aziz (2021) juga menyimpulkasn bahwa ketergantungan yang tinggi pada dana neraca fiskal dapat menghambat pemerintah daerah untuk mengembangkan sumber pendapatan sendiri. Selama pademi Covid-19, dana saldo fiskal menjadi sumber pendanaan yang semakin penting. Bhakti (2013), Melaporkan peningkatan yang signifikan dalam pengeluaran yang dibiayai oelh dana neraca fiskal, terutama untuk perawatan kesehatan dan bantuan sosial. Namu, ketergantungan yang

berlebihan pada dana ini menimbulkan tantangan bagi daerah yang berusaha mengembangkan sumber pendapatan yang lebih berkelanjutan. Efisiensi Pengeluaran Daerah dan Pengelolaan Keuangan. Pengeluaran daerah berfungsi sebagai instrumen utama untuk mengimplementasikan kebijakan publik tingkat lokal. Krisniwati (2021), mengidentifikasi juga tiga fungsi utama belanja pemerintah : Alokasi sumber daya, distribusi pendapatan dan stabilisasi ekonomi. Dalam konteks pemerintah daerah, pengeluaran harus diarahkan pada pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Studi Rahman & Saputra (2022) menemukan bahwa alokasi belanja daerah yang optimal dalam infrastruktur dan layanan publik berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, Selama pandemi covid 19 data dari Bappenas menunjukkan pergeseran prioritas pengeluaran, dengan peningkatan lokasi untuk perawatan kesehatan dan perlindungan sosial.

Sementara pengeluaran daerah yang produktif dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Anindya & Hermanto (2020), memperingatkan bahwa peningkatan pengeluaran tanpa peningkatan PAD yang sesuai dapat menyebabkan defisit anggaran dan penurunan efisiensi keuangan. Oleh karena itu, pengelolaan belanja daerah yang efektif sangat penting dalam menjaga stabilitas fiskal. Pengembangan hipotesis mempertimbangkan teori dan penelitian empiris yang disebutkan, hipotesis berikut dirumuskan :

Hipotesis 1 : PAD positif mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah studi oleh Budianto & Alexander (2016) dan Putri & Darmayanti(2019) Menunjukkan bahwa PAD tinggi mencerminkan kemandirian fiskal yang lebih besar, memungkinkan alokasi anggaran yang lebih efisien. Oleh karena itu penelitian ini membuat asumsi bahwa PHD meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah di Kalimantan Timur

Hipotesis 2 : dana neraca fiskal yang berparuh negatif kinerja keuangan pemerintah daerah Penelitian oleh Ginting at al. 2019 dan Verawati et al (2020a) menemukan bahwa ketergantungan yang tinggi pada dana keseimbangan fiskal melemahkan otonomi keuangan daerah. Oleh karena itu, penelitian ini berhipotesis bahwa ketergantungan yang lebih besar Pada dana neraca fiskal yang menyebabkan kinerja keuangan pemerintah daerah lebih rendah.

Hipotesis 3 : belanja daerah berpengaruh positif kinerja keuangan pemerintah daerah.

Anindya & Hermanto (2020) menunjukkan bahwa pengeluaran daerah yang dialokasikan dengan baik meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan stabilitas fiskal. Oleh karena itu penelitian ini mengasumsikan bahwa pengeluaran daerah berpengaruh baik terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Kalimantan Timur selama pandemi covid-19.

## Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama satu tahun, dari Januari 2021 hingga Desember 2021. tahapan pencarian meliputi persiapan, survei lapangan, pengumpulan data, pengolahan data, dan kompilasi laporan. penelitian ini dilakukan di 10 kabupaten dan kota di provinsi Kalimantan Timur, Indonesia. Desain penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan deskriptif. Pendekatan deskriptif digunakan untuk memahami keadaan kawan pemerintah kota sebelum melakukan analisis statistik (Sugiyono, 2016), sedangkan pendekatan kuantitatif digunakan untuk memeriksa hubungan antar variabel melalui analisis regresi berganda.

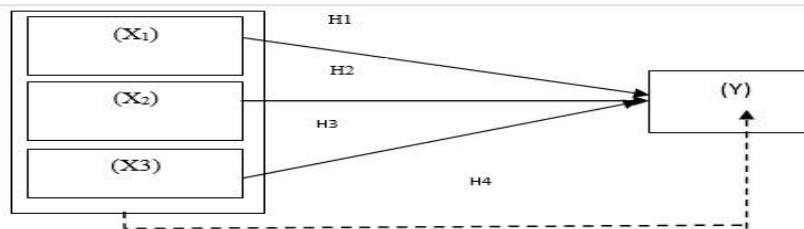
Pada tahap awal, laporan realisasi anggaran (LRA) dari pemerintah daerah di Kalimantan Timur dianalisis menggunakan rasio keuangan untuk mendapatkan indikator kinerja berganda. rasio keuangan ini kemudian digunakan sebagai variabel dalam analisis regresi berganda untuk menguji

pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan belanja daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

**Variabel Penelitian**

Variabel dalam penelitian dikategorikan sebagai berikut :

1. Variabel Dependen (Y) ; Kinerja keuangan pemerintah daerah, diukur menggunakan rasio keuangan seperti rasio pemandian keuangan, rasio efektivitas dan rasio efisiensi.
2. Variabel Independen (X1) ; Penerimaan awal daerah (PAD), diukur berdasarkan total PAD yang diterima dalam APBD. (Anggaran pendapatan dan belanja daerah) :  
 $X_2$  : Dana Perimbangan, diukur berdasarkan total dana saldo fiskal yang di alokasikan kepada pemerintah daerah.  
 $X_3$  : Belanja daerah, diukur berdasarkan total pemerintahan pengeluaran yang tercatat dalam APBD.



**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran**  
 Sumber: Penulis, 2021

**Keterangan:**

- $X_1$  = Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- $X_2$  = Dana Perimbangan
- $X_3$  = Belanja Daerah
- Y = Kinerja Keuangan
- ▶ = Pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen
- - - - -▶ = Pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen

**Populasi dan Sampel**

Jumlah penduduk dalam penelitian ini terdiri dari seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Timur berjumlah 10 wilayah administratif. Sampel tersebut mencakup data keuangan dari 10 Kabupaten dan kota, berdasarkan laporan APBD dari Tahun fiskal 2020.

**Teknik pengumpulan data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam investigasi ini didasarkan pada (Subagyo, 2020) dsn meliputi

1. Observasi : langsung memeriksa dan menganalisis variabel yang ditargetkan dalam penelitian ini.
  2. Dokumentasi; pengumpulan data dengan dokumen keuangan, khususnya laporan realisasi anggaran (LRA) dari APBD Pemerintah Kabupaten dan kota di Kalimantan Timur untuk tahun anggaran 2020. Data diperoleh dari sumber resmi, seperti Direktorat Jenderal neraca fiskal (DJPK). Kementerian Keuangan dan Badan Pusat Statistik (BPS). teknik analisis data penelitian ini menggunakan metode analisis statistik sebagai berikut ;
1. Analisis regresi linear berganda, analisis Regresi linier  
 Korelasi berganda adalah Teknik statistik yang digunakan untuk menetapkan persamaan regresi. persamaan itu membantu memprediksi variabel dependen berdasarkan variabel independen, menilai potensi kesalahan, dan menganalisis hubungan antar variabel baik secara

bersamaan maupun sebagian. Persamaan regresi umum Untuk Pengujian Hipotesis Dalam penelitian ini

$$Y = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Dengan:

Y : Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kab/Kota di Kalimantan Timur

X<sub>1</sub> : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

X<sub>2</sub> : Dana Perimbangan

X<sub>3</sub> : Belanja Daerah

b<sub>0</sub> : Konstanta, merupakan nilai terikat, yang dalam hal ini adalah Y pada saat variabel bebasnya adalah 0 (x<sub>1</sub>, x<sub>2</sub>, x<sub>3</sub> = 0)

b<sub>1</sub> : Koefisien regresi multiple antara variabel bebas X<sub>1</sub>, terhadap variabel terikat Y, bila variabel x<sub>2</sub> dianggap konstan.

b<sub>2</sub> : Koefisien regresi multiple antara variabel bebas X<sub>2</sub>, terhadap variabel terikat Y, bila variabel x<sub>1</sub> dianggap konstan.

b<sub>3</sub> : Koefisien regresi multiple antara variabel bebas X<sub>3</sub>, terhadap variabel terikat Y, bila variabel x<sub>1</sub> dan x<sub>2</sub> dianggap konstan.

e : Istilah kesaahan yang mewakili faktor eksternal di luar model

### Analisis Korelasi Ganda

Desain korelasi ganda (R) dan koefisien penentu (R<sup>2</sup>) dihitung untuk menentukan kekuatan hubungan antara semua variabel independen (X<sub>1</sub>, X<sub>2</sub>, X<sub>3</sub>) dan variabel Dependen (Y)

### Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulisan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut yaitu:

1. Observasi, yakni mengamati dan meneliti secara langsung terhadap variable yang menjadi sasaran penelitian.
2. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dengan cara mempelajari catatan-catatan dan dokumen-dokumen Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang ada pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2020 . Data yang dikumpulkan melalui observasi dan dokumentasi dari web resmi Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan dan BPS. Data dalam penelitian ini dapat dikelompokkan dalam 2 jenis, meliputi data Kuantitatif, yaitu data terungkap dan berbentuk angka-angka hasil olahan dalam penelitian, dan data Kualitatif, yaitu data yang bersifat deskriptif yang diharapkan dapat menjelaskan masalah yang akan diteliti.

### Teknik Analisis Data

Adapun metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Statistik:

#### a) Analisis Regresi Linier Berganda (*Multipel Regression Analysis*)

*Multiple Linier Regresion* dan *Corellation Analysis* adalah teknik statistik yang digunakan untuk mencari persamaan regresi, yang dapat digunakan untuk meramal variabel terikat dari variabel bebas, mencari kemungkinan kesalahan dan menganalisa hubungan antara sebuah variabel terikat dengan dua atau lebih variabel bebas, baik secara simultan maupun parsial.

Persamaan analisis regresi linier secara umum untuk menguji hipotesis-hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Dengan:

Y : Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kab/Kota di Kalimantan Timur

X<sub>1</sub> : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

X<sub>2</sub> : Dana Perimbangan

- $X_3$  : Belanja Daerah
- $b_0$  : Konstanta, merupakan nilai terikat, yang dalam hal ini adalah Y pada saat variabel bebasnya adalah 0 ( $x_1, x_2, x_3 = 0$ )
- $b_1$  : Koefisien regresi multiple antara variabel bebas  $X_1$ , terhadap variabel terikat Y, bila variabel  $x_2$  dianggap konstan.
- $b_2$  : Koefisien regresi multiple antara variabel bebas  $X_2$ , terhadap variabel terikat Y, bila variabel  $x_1$  dianggap konstan.
- $b_3$  : Koefisien regresi multiple antara variabel bebas  $X_3$ , terhadap variabel terikat Y, bila variabel  $x_1$  dan  $x_2$  dianggap konstan.
- e : Faktor pengganggu di luar model

Arti koefisien b adalah jika nilai b positif (+), hal tersebut menunjukkan hubungan searah antara variabel bebas dengan variabel terikat. Dengan kata lain, peningkatan atau penurunan besarnya variabel bebas akan diikuti oleh peningkatan atau penurunan besarnya variabel terikat. Sedangkan jika nilai b negatif (-), menunjukkan hubungan yang berlawanan antara variabel bebas akan diikuti oleh penurunan besarnya nilai variabel terikat dan sebaliknya.

**b) Analisis Korelasi Berganda (Multiple)**

Koefisien korelasi ganda (R) dan koefisien determinasi (multi korelasi),  $R^2$  yang dihitung untuk menentukan kekuatan hubungan antara semua variabel independen ( $X_1, X_2, X_3$ ) dan Variabel Dependen (Y).

$$(1-R^2_{y.12}) = (1-r^2_{y1})(1-r^2_{y2.1})(1-r^2_{y2.1})$$

$R^2_{y.12}$  merupakan koefisien determinasi multiple-nya (Penentu). Mengukur proporsi varian dalam Y dijelaskan oleh  $X_1, X_2, X_3$ .

Jika  $R^2$  mendekati 1, model menjelaskan proporsi variasi yang tinggi dalam Y.

**c) Analisis Korelasi Parsial**

Analisis ini menilai pengaruh parsial dari setiap variabel independen pada variabel dependen. Koefisien korelasi parsial antara setiap variabel independen ( $X_1, X_2, X_3$ ) dan variabel dependen (Y) dihitung menggunakan rumus :

Korelasi Y atas  $X_1, X_2, X_3$

Korelasi Y atas  $X_1$  (Mengendalikan  $X_2$  dan  $X_3$ )

Korelasi Y atas  $X_2$  (Mengendalikan  $X_1$  dan  $X_3$ )

Korelasi Y atas  $X_3$  (Mengendalikan  $X_1$  dan  $X_2$ )

Koefisien Korelasi (r) berkisar dari -1 hingga 1 :

Bila r mendekati 1, Variabel memiliki hubungan positif yang kuat

Bila r mendekati -1, Variabel memiliki hubungan negatif yang kuat

Jika r mendekati 0, maka dapat dikatakan bahwa hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat sangat lemah atau bahkan tidak ada.

**d) Uji F**

Uji F untuk nilai signifikansi menguji model regresi yang menjelaskan efek simultan antara variabel bebas (independen ( $X_1, X_2, X_3$ )) terhadap variabel terikat (dependen (Y)). Uji dapat dirumuskan sebagai berikut:

$R^2$  = Koefisien Determinasi

n = Ukuran Sampel

k = Banyaknya Variabel Bebas

$$F = \frac{R^2/k_1 - R^2.(n)}{(-k)}$$

Nilai F dari hasil perhitungan di atas kemudian diperbandingkan dengan  $F_{tabel}$  atau F yang diperoleh dengan mempergunakan tingkat risiko atau *Significance* 5% dan *Degree of Freedom* pembilang dan penyebut, yaitu  $V_1 = k$  dan  $V_2 = (n-k-1)$  dimana kriteria yang digunakan adalah:

Jika  $F_{hitung} \leq F_{tabel}$ , maka  $H_0$  diterima (tidak ada pengaruh simultan)

Jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak (ada pengaruh simultan).

Bila terjadi penerimaan  $H_0$ , maka dapat diartikan sebagai tidak signifikannya model regresi multiple yang diperoleh, sehingga mengakibatkan tidak signifikan pula pengaruh dari variabel-variabel independen secara bersama-sama (simultan terhadap variabel dependen)

#### e) Uji t

Uji t untuk menguji pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat (dependen). Digunakan untuk menguji signifikansi koefisien regresi secara parsial. Uji t dilakukan untuk menguji hipotesis pertama, kedua dan ketiga. Pengujian dilakukan dengan membandingkan  $t_{tabel}$  dan  $t_{hitung}$  yang dirumuskan sebagai berikut :

Masing-masing t hasil perhitungan ini kemudian dibandingkan dengan  $t_{tabel}$  yang diperoleh dengan menggunakan tarif nyata 0,05. Uji hipotesis secara parsial menggunakan uji 2 pihak, dengan kriteria :

$H_0$  diterima bila :  $t_{htg} \leq t_{\alpha/2}$ , atau  $t_{hitung} \leq t_{tabel}$

$H_0$  ditolak bila :  $t_{htg} > t_{\alpha/2}$ , atau  $t_{hitung} > t_{tabel}$

Bila terjadi penerimaan  $H_0$ , maka disimpulkan bahwa pengaruh parsial adalah tidak signifikan. Sedangkan bila  $H_0$  ditolak artinya, terdapat pengaruh parsial yang signifikan. Perhitungan statistik yang digunakan dalam penelitian ini akan dihitung dengan menggunakan program SPSS

## Hasil

### Deskripsi Objek Penelitian

Penelitian ini meneliti seluruh pemerintah kabupaten dan kota di provinsi Kalimantan Timur di 2021. Pemilihan periode ini bertujuan untuk memberikan penilaian yang objektif terhadap dinamika keuangan daerah di masa pandemi Covid-19. Sumber data utama untuk penelitian ini berasal dari laporan resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Neraca Fiskal, Kementerian Keuangan Indonesia, melalui situs resminya ([www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id)).

### Uji Asumsi Klasik

Tes *Kolmogorov-Smirnov* sebesar 0,648, dengan tingkat signifikansi 0,794 (0.05.). Hasil ini menunjukkan bahwa data penelitian didistribusikan secara normal, memungkinkan penggunaan analisis regresi linier berganda.

### Uji multikolinearitas

Multikolinearitas diuji dengan memeriksa Nilai Toleransi dan *Varian Inflation Factor* (VIF). Hasilnya bahwa semua variabel memiliki nilai toleransi  $> 0.1$  dan nilai VIF  $< 10$ , yang menunjukkan tidak ada masalah multikolinearitas dalam model regresi.

### Uji Autokorelasi

Tes Durbin-Watson sebesar 1,565 yang berada dalam kisaran yang dapat diterima (1,5 - 2,5). Ini menegaskan bahwa tidak ada masalah dengan model Autokorelasi.

### Tes Heteroscedastisitas

Hasil uji Heteroscedastisitas menunjukkan bahwa nilai T untuk setiap model setiap variabel memiliki tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05 menegaskan tidak ada masalah Heteroscedastisitas dalam penelitian ini. pengaruh Penerimaan Asli Daerah (PAD) terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

## Pembahasan

Analisis regresi menunjukkan bahwa pad memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dengan nilai  $t = 3.664$ , tabel- $t = 2,024$  dan tingkat signifikansi  $0,030 (< 0,05)$ . Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi yang dihasilkan wilayah pad semakin baik kinerja keuangannya.

Temuan ini sejalan dengan Budianto & Alexander (2016), yang berpendapat bahwa pad merupakan indikator kunci kemandirian fiskal daerah dan berkontribusi pada peningkatan kapasitas keuangan pemerintah daerah. Putri & Darmayanti (2019), juga menekankan bahwa daerah dengan PAD tinggi memiliki fleksibilitas anggaran yang lebih besar dan mendanai dalam mendanai pembangunan pelayanan publik tanpa ketergantungan berlebihan pada subsidi dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus meningkatkan kapasitas pad dengan mengoptimalkan penerimaan pajak, retribusi daerah, dan inovasi pengelolaan aset. Pengaruh dana saldo fiskal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil regresi menunjukkan bahwa dana sadar berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dengan nilai- $t = -2,464$ , tabel- $t = 2,042$  dan tingkat signifikansi  $0,021 (< 0,05)$ . Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi ketergantungannya suatu wilayah pada dana keseimbangan fiskal, semakin rendah kinerja keuangannya. Temuan ini mendukung Ginting et al (2019), yang menemukan bahwa ketergantungan yang berlebihan pada dana saat do fiskal mengurangi inovasi pemerintah daerah dalam menghasilkan pendapatan Mandiri. Firawati et al (2020b) juga menunjukkan bahwa daerah yang sangat bergantung pada dana neraca visual cenderung memiliki fleksitas visual yang lebih rendah dan kinerja kawan yang tidak optimal. Oleh karena itu, Kebijakan desentralisasi fiskal harus mendorong kemandirian daerah yang lebih besar dengan mengurangi ketergantungan pada transfer pemerintah pusat.

**Pengaruh belanja daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah**

Analisis regresi menunjukkan bahwa belanja daerah memiliki efek positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dengan  $t$ -value =  $3,036$   $t$ -tabel =  $2,042$  dan asinifikansi level  $0,006 (< 0,05)$ . Hal ini menunjukkan pengeluaran regional yang dikelola secara efisien berkontribusi pada peningkatan kinerja keuangan. Temuan ini sejalan dengan Anindya & Hermanto (2020) yang menemukan bahwa alokasi belanja daerah yang optimal, khususnya di bidang infrastruktur dan pelayanan publik, meningkatkan produktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, sehingga pada akhirnya memperkuat kinerja keuangan. Rabbani 2020 juga menemukan bahwa daerah dengan belanja modelnya yang lebih tinggi dan cenderung memiliki stabilitas fiskal yang lebih baik. Dengan demikian, pemerintah daerah harus memastikan bahwa belanja daerah secara efektif dan efisien dialokasikan untuk program yang memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang maksimal.

Hasil investigasi ini menyimpulkan bahwa pendapatan (PAD) dan belanja daerah merupakan positif terhadap, sedangkan dana saldo fiskal yang berdampak negatif. Hal ini menyiratkan bahwa PAD yang lebih tinggi dan pengeluaran daerah yang dikelola dengan baik berkontribusi pada peningkatan kinerja keuangan, Sementara ketergantungan yang berlebihan pada dengan neraca fiskal mengurangi independensi fiskal dan melemahkan keberlanjutan keuangan. Dari sisi implikasi kebijakan, optimalisasi PAD sangat penting untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah. Pemerintah daerah di Kalimantan Timur harus secara proaktif memaksimalkan potensi pendapatan daerah untuk mengurangi ketergantungan pada transfer pemerintah pusat. Ekstensifikasi dan intensifikasi pajak yang mampu mencapai hal ini, meningkatkan efisiensi manajemen aset, dan mengembangkan strategi perolehan pendapatan yang inovatif. Selain itu, pemanfaatan dana saldo fiskal harus dievaluasi dengan cermat. Meskipun dana ini penting untuk anggaran daerah, ketergantungan yang berlebihan pada mereka berdampak negatif pada kinerja keuangan. Oleh karena itu, diperlukan penilaian komprehensif terhadap alokasi dana neraca fiskal untuk memastikan bahwa daerah tersebut dapat digunakan untuk pembangunan instal struktur dan kesejahteraan masyarakat, dari

pada dialokasikan untuk biaya operasional. Peningkatan efektivitas pengelolaan anggaran diperlukan untuk meningkatkan keberlanjutan keuangan. Pemerintah daerah harus menyeimbangkan belanja operasional dan modal, memprioritaskan pembangunan infrastruktur dan peningkatan pengeluaran yang memiliki dampak yang sirugikan terhadap masyarakat juga penting. Dengan menerapkan strategi ini, Kemandirian fiskal daerah diharapkan dapat menguat, memungkinkan Pembangunan Daerah yang lebih berkelanjutan dan meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah Kalimantan Timur.

## Kesimpulan

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dan belanja daerahnya berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sedangkan neraca fiskal berdampak terhadap kinerja keuangan bersifat negatif. hal ini menunjukkan bahwa PAD yang lebih tinggi dan pengeluaran daerah yang dikeluarkan dengan baik berkontribusi pada peningkatan kinerja keuangan, Sedangkan ketergantungan yang tinggi pada dana neraca fiskal menghambat kemandirian dana fiskal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, yang menunjukkan bahwa disintegrasian fiskal tetap tidak optimal di daerah tertentu.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. pertama, hanya mencakup 8 Kabupaten atau kota profesi di Kalimantan Timur, membatasi generalisasi temuan ke daerah lain di Indonesia. kedua, periode penelitian dibatasi pada tahun 2021, Untuk mencegah analisis jangka panjang dan pengelolaan keuangan terutama dalam menanggapi perubahan kebijakan fiskal pasca pandemi covid-19. ketiga, akses data yang terbatas telah membatasi kedalaman Analisis untuk masing-masing dan beberapa faktor potensial yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah belum diperiksa.

Untuk penelitian ini di masa depan, disarankan untuk memperluas cakupan geografis dengan memasukkan profesi tambahan di Indonesia dan memperpanjang masa studi untuk memiliki pemahaman yang lebih menyeluruh tentang tren regional jangka panjang dalam pengelolaan keuangan.

Selain itu, studi di masa depan harus bertujuan untuk mendapatkan data pendukung yang lebih rinci dan menggabungkan variabel tambahan seperti inflasi daerah, pertumbuhan ekonomi, kapasitas fiskal dan efektivitas pengelolaan anggaran untuk meningkatkan akurasi temuan serta memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih kuat.

## Referensi

- Darise, Nurlan. 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: PT INDEKS Kelompok Gramedia.
- Fahmi, Irham. 2012. *Analisis Laporan Keuangan*. Cetakan ke-2. Bandung: Alfabeta.
- Farel, R. (2015). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Belanja Modal di Kabupaten Bogor. *Signifikan*, 4(2), 194659.
- Ghozali, Imam. 2012. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Halim, Abdul. 2014. *Manajemen Keuangan Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik: Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat.
- Mahmudi. 2007. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UII Press.
- Mahmudi. 2007. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Jakarta: UPP STIM YKPN.

Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.

Nordiawan, Deddi dan Hertianti, Ayuningtyas. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Edisi Kedua*. Jakarta: Salemba Empat.

Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintah Daerah*. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintah Daerah dan Keuangan Daerah*.

### Artikel

Andriani, N. L., & Yuliana, L. (2016). Analisis Determinan Belanja Modal Pemerintah Provinsi di Indonesia Tahun 2010-2013. *Jurnal Ilmiah WIDYA*, 3(3), 140-146.

Aprizay, S., Yudi, D., & Muhammad, A. (2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Pengalokasian Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. *Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 3(1).

Habibi, K. A., Imtikhanah, I., & Hidayah, R. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Se-Provinsi Jawa Tengah Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19. *Neraca*, 17(1), 122–147.

Hidayah, R., Imtikhanah, S., & Habibi, K. A. (2021). ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH SE-PROVINSI JAWA TENGAH SEBELUM DAN SAAT PANDEMI COVID19: Dibuat Oleh Kurnia Ahsanul Habibi, Sobrotul Imtikhanah, Rini Hidayah (Dosen dan Mahasiswa FEB Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan). *Neraca*, 17(1), 122-147.

Martini, Kadek dan Dwirandra. 2015. “Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Pada Alokasi Belanja Modal di Provinsi Bali”. *E-Journal Akuntansi Universitas Udayana*, Volume 10, No. 2.

Novianto, Riko dan Rafiudin Hanafiah. 2015. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat”. *Jurnal Ekonomi*, Volume 4, No. 1.

Palealu, Marzel. 2013. “Pengaruh DAK, PAD Terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota Manado Tahun 2003-2012”. *Jurnal EMBA*, Volume 1, No.4.

Paramartha, Fajar dan Budiasih, Nyoman. 2016. “Analisis *Flypaper Effect*, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Pada Belanja Modal”. *E-Journal Akuntansi Universitas Udayana*, Volume 15, No. 2.

Prastiwi, Ayu, Nurlaela, Siti dan Yuli Chomsatu. 2016. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Pegawai Terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota Surakarta”. *Seminar Nasional IENACO*.

Setyowati, Lilis dan Yohana Kus Suparwati. 2012. “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Dengan Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Se-Jawa Tengah)”. *Prestasi*, Volume 9, No. 1.

Sularso, Havid, dan Yanuar E Restianto. 2011. “Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah”. *Media Riset Akuntansi*, Volume 1, No.1.

### **Peraturan**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintah*.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 55 Tahun 2005 tentang *Dana Perimbangan*.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 2005 tentang *Belanja Modal*.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 33/PMK.07/2015 tentang *Peta Kapasitas Fiskal Daerah*.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 91/PMK.06/2007 tentang *Bagan Akun Standar*.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 101/PMK.02/2011 tentang *Klasifikasi Anggaran*.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 214/PMK.05/2013 tentang *Bagan dan Standar*.

Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang *Belanja Modal*.

Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah*.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang *Pemerintah Daerah*. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang *Dana Alokasi Khusus*.

### **LINK**

<https://kaltimprov.go.id/daftar-kabupaten>

[www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id).